



Pertemuan Regional Komite Pengelolaan Bersama Perikanan “Berkolaborasi Menuju Perikanan Berkelanjutan”

16 Januari 2019

Prepared by : Masyarakat dan Perikanan Indonesia-MDPI

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	03
TUJUAN	04
RANGKUMAN AGENDA	04
DISKUSI	04
REKOMENDASI	09
DOKUMENTASI	11
LAMPIRAN-LAMPIRAN	12

PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 menetapkan bahwa sumber daya ikan dan lingkungannya merupakan kekayaan alam di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang harus dikelola secara berkelanjutan, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka tatakelola sumberdaya ikan yang baik menjadi salah satu prasyarat yang harus dirancang dan dilaksanakan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan potensi sumberdaya ikan termasuk jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis penting antara lain seperti tuna, cakalang dan tongkol. Menurut the *State of World Fisheries and Aquaculture* (SOFIA), Indonesia memberikan kontribusi sekitar 16% terhadap produksi perikanan TCT dunia dan sekitar 20% terhadap perikanan nasional. Mengingat peran penting perikanan TCT untuk Indonesia, telah diterbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 107 Tahun 2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol. Keputusan ini menjadi acuan operasional dalam pelaksanaan praktek pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya TCT secara berkelanjutan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah termasuk para pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Peter Willian (2017), pengelolaan tuna mutlak didasarkan pada ketersediaan dan mengatakan:

- a. Data tidak tersedia (*No Data*) maka tidak ada pengelolaan (*No Management*)
- b. Data tidak baik (*Poor Data*), maka pengelolaan memiliki ketidakpastian (*Uncertainty*).
- c. Data yang bagus (*Good Data*), maka pengelolaan dapat memprediksi (*Predictable*).

Mengingat data merupakan dasar pelaksanaan praktek pengelolaan TCT, maka Dinas Perikanan dan Kelautan bersama MDPI menggagas pembentukan Komite Pengelola Data Perikanan (KPDP) TCT di tingkat provinsi yaitu Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTB, dan NTT. Komite ini merupakan salah satu wadah kolaborasi antar pemangku kepentingan perikanan TCT untuk bersinergi mewujudkan pemanfaatan sumberdaya TCT secara berkelanjutan. Mengingat faktor kebersamaan antar pemangku kepentingan menjadi syarat dalam proses pengambilan keputusan pada komite ini, maka komite ini sesungguhnya merupakan **Komite** bersama, maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan perikanan dapat lebih diperkuat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran **serta masyarakat**.

TUJUAN

Pertemuan Regional Komite Pengelola Data Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol (KPDP-TCT) dilaksanakan dengan tujuan antara lain:

1. Berbagi informasi terhadap capaian dan tantangan pelaksanaan KPDP;
2. Pengesahan perubahan nama dan konsep Komite Pengelola Data Perikanan (KPDP) menjadi Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (KPBP) atau (*Fisheries Co-Management Committee*) dengan singkatan **FCMC**.
3. Meningkatkan pemahaman dan berbagi informasi terhadap manfaat pengelolaan bersama

RANGKUMAN AGENDA

Pertemuan dilaksanakan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Gedung Mina Bahari II lantai 14, pada tanggal 16 Januari 2019. Peserta berjumlah 106 orang (27 Wanita, 79 pria) yang terdiri dari beberapa Perwakilan pemerintah Pusat (KKP), Pemerintah Daerah (DKP/Dinas Perikanan Kabupaten/Kota), LIPI Ambon, Universitas (UNHAS) Perusahaan, pengumpul Ikan, Nelayan, Media/Wartawan, Lembaga Donor dan LSM. Pertemuan membahas dan mendiskusikan terkait perkembangan Komite di Provinsi masing-masing, Pentingnya Pengelolaan Bersama, Perubahan nama Komite, yang awalnya adalah Komite Pengelola Data Perikanan (KPDP) menjadi Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (KPBP). Perubahan nama komite ini dilatarbelakangi oleh pertemuan komite yang tidak hanya membahas tentang data, melainkan isu-isu yang berkembang di daerah. Saat pertemuan juga ada sesi pemberian plakat dan sertifikat bagi supplier dan nelayan yang telah berkontribusi dalam mendukung perikanan berkelanjutan di daerahnya masing-masing. Perwakilan pemerintah daerah, perusahaan, supplier, dan nelayan tersebut berasal dari Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

DISKUSI

Pengantar dari Trian Yunanda (Kasubdit SDI ZEE dan Laut Lepas PSDI-DJPT)

- Ucapan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya dalam pertemuan Regional Komite Pengelola Data Perikanan (KPDP)
- Salah satu capaian atas kerjasama KKP dengan MDPI yaitu terciptanya MoU antara KKP dengan MDPI
- Pembentukan KPBP merupakan salah satu tindak lanjut dari pembuatan MoU tersebut
- KPDP ini merupakan wadah para stakeholder untuk dapat berkolaborasi dalam pemanfaatan/pengelolaan sumberdaya perikanan
- Salah satu tujuan dari pertemuan ini yaitu menggantikan nama Komite yang awalnya Komite Pengelola Data Perikanan (KPDP) menjadi Komite Pengelolaan Bersama Perikanan TCT
- Harapannya kedepan dengan adanya Komite ini, para stakeholder dapat merasakan manfaatnya, dan dapat berkomitmen untuk berkolaborasi dalam Pengelolaan Perikanan

Pengantar dari Saut Tampubolon (Direktur Eksekutif MDPI)

- Ucapan terimakasih kepada Dirjen Perikanan Tangkap (Zulfikar Mochtar) dalam mendukung para nelayan kecil yang didampingi oleh MDPI.
- Beberapa capaian MDPI disampaikan oleh Saut

- MDPI berhasil membuat teknologi dan pengembangan teknologi ketertelusuran ikan seperti trafik dan trace tales. Produk yang dapat tertelusuri sebanyak 1383 ton.
- MDPI mensupport pendaftaran kapal untuk memperoleh BPKP sebanyak 220.
- MDPI melakukan bimbingan kelompok nelayan Fair Trade (FT), dengan 39 kelompok FT, 859 nelayan, dengan total dana premium yang sudah diperoleh 1,4 miliar.
- Komite Pengelola Data Perikanan (KPDP) telah dibentuk di 6 Provinsi, dan rutin melakukan pertemuan selam 2 kali dalam setahun.
- Full assessment sertifikasi MSC akan dilakukan pada tahun ini untuk yellow fin tuna di pulau Buru, Provinsi Maluku

Pengantar dari Zulfikar Mochtar (Dirjen Perikanan Tangkap, KKP)

- Ucapan terimakasih kepada MDPI disampaikan sebagai fasilitator pengelolaan bersama perikanan di beberapa provinsi
- Indonesia merupakan salah satu penghasil tuna terbesar di dunia, yaitu 16 % total per-tahun
- 70 % dari tangkapan tuna di Indonesia, berasal dari nelayan kecil
- Besarnya sumberdaya Tuna yang dimiliki oleh Negara, harus dikelola secara bersama-sama.
- Pengelolaan tuna tidak hanya ditangani oleh Indonesia, namun oleh dunia yang dikelola oleh RFMO untuk memastikan pengelolaan tuna disetiap Negara berjalan dengan baik.
- Ecolabel seperti Fair Trade dan MSC sangat diperlukan untuk pasar, sebagai jaminan bahwa produk tersebut menjamin keberlanjutan

Penyerahan Plakat dan sertifikat kepada supplier champion dan nelayan, atas kontribusinya dalam mendukung perikanan berkelanjutan

Kegiatan Pengelolaan Tuna Nasional Pemanfaatan Perikanan Tuna di RFMO (Trian Yunanda)

- Pengelolaan tuna, tidak hanya dilakukan secara nasional, namun juga international. Yaitu RFMO (UNCLOS 1982). Menekankan bahwa pemanfaatan dan konservasi tuna di wilayah ZEE dan Laut Lepas harus dilakukan melalui kerjasama internasional (RFMO)
- Indonesia merupakan anggota IOTC, WCPFC dan CCSBT yang wajib melaporkan datanya
- Beberapa kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam pengelolaan tuna yaitu Pemanfaatan Tuna di wilayah RFMOs belum maksimal, Data tangkapan Tuna belum akurat, Pemasangan rumpon untuk pemanfaatan tuna belum sesuai dengan aturan dan Coverage Observer 5% untuk kapal-kapal yang menangkap tuna belum terpenuhi
- Fokus Kebijakan SDI ZEE dan Laut Lepas, yaitu Perbaikan Data Tuna, (Monitoring dan Pelaporan), Perbaikan system pendaftaran kapal, CPIB dan Proses Sertifikasi, Pengendalian Rumpon dan Implementasi Harvest Strategy di Perairan Kepulauan

Outlook kebijakan dan Program Perikanan Tangkap untuk nelayan kecil T.A 2019 (Kepala bagian program)

• Kegiatan Prioritas Ditjen Perikanan Tangkap TA. 2019

- Pengadaan kapal perikanan sebanyak 301 unit (1 kapal pengangkut 60 GT, 300 kapal penangkap < 5GT) yang disebar dalam 19 Provinsi
- Pengadaan alat penangkapan ikan ramah lingkungan (Rawai Dasar Rawai Hanyut, Handline (handline tipe mata tiga, handline tuna, handline layur), PancingTonda, Pole and Line dengan volume 2000 unit dengan tentatif distribusi di 30 Provinsi
- Pengadaan mesin kapal sebanyak 350 unit (Mesin tempel 330 unit dan ketinting 20 unit) dengan tentative distribusi di 19 provinsi (Sumut, Kepri, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sultra, Sulbar, Gorontalo, NTB, Maluku, Maluku)
- Bantuan premi asuransi bagi 150.000 nelayan di 34 provinsi selama 1 tahun. Jenis pertanggung jawaban kematian, cacat, biaya pengobatan akibat aktivitas penangkapan ikan maupun selain aktivitas penangkapan ikan. Penetapan penerima BPAN dilaksanakan minggu ke- 2-3 Juni 2019.
- Permodalan kampung nelayan dari KUB menjadi koperasi untuk 2.120 kelompok, Penataan kampung nelayan di 40 lokasi, dan permodalan perikanan tangkap di 34 provinsi.
- Penempatan observer onboard 300 unit, logbook penangkapan ikan 4000 unit, 1 TPI perairan darat, dan pelanjutan penataan perijinan di 11 WPP.
- Operasionalisasi 4 SKPT (Natuna, Sebatik, Merauke dan Saumlaki) dan pengembangan Pelabuhan Perikanan 1 lokasi (PPI Cikadang)
- Salah satu syarat untuk dapat memperoleh bantuan yaitu KUSUKA

Berbagi Pengalaman Terhadap Pencapaian dan Tantangan dalam KPDP di masing-masing Provinsi.

➤ Provinsi Maluku (Ahmad Umarela, Kabid Perikanan Tangkap, DKP Provinsi Maluku)

- KPDP di Maluku sempat stagnan (jalan ditempat). Namun proses sedang mulai berjalan
- Proses pembaharuan komite sedang dijalankan
- Pembangunan Provinsi Maluku didasarkan pada gugus pulau. Maluku memiliki 12 Gugus Pulau
- Produksi Tuna di Maluku pada tahun 2017 – 2018 yaitu 35.974,2 ton. Cakalang 127.189,7 ton dan tongkol 99.991.1 ton
- Sebanyak 211 BPKKP sudah di terbitkan oleh DKP Maluku.
- Permasalahan yang dihadapi saat ini di Prov. Maluku dalam rangka pengelolaan perikanan yaitu Data tuna belum tercatat dengan baik, keterampilan nelayan masih rendah, keterbatasan kapal penangkap ikan yang sesuai, dan ketersediaan pabrik es yang masih terbatas

➤ Provinsi Maluku Utara (Ibrahim Asnawi, staf Perikanan Tangkap DKP Prov. Maluku Utara)

- KPDP di Maluku Utara dimulai pada tahun 2018
- KPDP TCT terbentuk pada bulan Februari 2018, ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara No. 523/121/DKP
- Sudah 3 kali pertemuan rutin dilaksanakan, dan dalam tiap pertemuan menghasilkan action plan kesepakatan bersama untuk 6 bulan kedepannya.
- Saat ini ada 3 kab./Kota yang tergabung dalam KPDP, yaitu kota Ternate, Kab. Halmahera Selatan dan kab. Kep. Morotai.
- Beberapa kabupaten akan tergabung dalam KPDP masih dalam proses pengembangan (Halut, Tidore dan Sanana)

- Saat ini Maluku Utara memiliki database tuna dalam IFISH yang di support oleh MDPI
 - Ada 274 kapal dalam proses registrasi dokumen, baik sudah ada BPKP, pengumpulan dokumen, pengukuran maupun pas kecil
 - Beberapa tantangan KPDP dalam menjalankannya yaitu SDM, Kelembagaan dan Anggaran
- **Provinsi Sulawesi Utara (Tienneke Adam, Kabid Perikanan Tangkap, DKPD Prov. Sulawesi Utara)**
- Sulawesi Utara memiliki KPDP sejak tahun 2017 yang diputuskan melalui SK Gubernur no. 390 tentang Pembentukan Komite Pengelola Data Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol di Wilayah Pengelolaan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan
 - Beberapa pencapaian komite yaitu melaksanakan training penanganan ikan yang baik diatas kapal dan uji histamine, Penggunaan alat e-CDT, Pendaftaran kapal nelayan skala kecil (BPKP) di Manado, Pulau Nain, Talawaan Bajo, dan Kep. Sangihe serta pengumpulan data TCT
 - Beberapa hal yang perlu didukung dalam Komite yaitu semangat dan kesadaran yang kuat oleh stakeholder, anggaran untuk mendukung kegiatan (APBN, APBD dan Donor) serta system data online untuk memudahkan segala proses administrasi
- **Provinsi NTT (Ernes D. Hamel, Kabid Perikanan Tangkap DKP Provinsi NTT)**
- MDPI lumayan membantu kami dalam sektor data. Khususnya data Tuna dan Cakalang, serta rumpon.
 - Rencana aksi bersama dalam KPDP yang sudah dan akan dilaksanakan diantaranya ;
 1. Pengumpulan data hasil tangkapan.
 2. Pelaporannya di berikan kepada DKP provinsi.
 3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi teknis
 4. Sosialisasi Log Book
 5. Pemasangan alat monitoring vessel (Spot Trace)
 6. Melaksanakan inventarisasi rumpon
 7. Kegiatan hari perikanan sedunia.
 8. Inventarisasi Rumpon
 - Rekapitulasi pendataan rumpon sesuai titik koordinat sudah di data 49 unit. Karena sesuai dengan kebijakan OSS bahwa aturan pemasangan rumpon sudah ditiadakan.
 - Terkait Potensi, NTT berada pada 3 WPP (573, 713 dan 714). Potensi lestari 491.700 ton/tahun.
 - Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengelolaan bersama antara lain berdasarkan UU 23 th 2014, kapal 0-5 GT penerbitan BPKP dilaksanakan di Kab./Kota. Namun sebagian besar Kab./ Kota tidak pernah menjalankannya.
- **Provinsi Sulawesi Selatan (Febrian Budiarto, Kasubag TU Pelabuhan Perikanan Wilayah II) DKP Prov. Sulawesi Selatan**
- KPDP Sulawesi Selatan Terbentuk pada bulan Maret 2017, dengan SK DKP Prov. Sulawesi Selatan 523/51/SK/TKP/KPDPTCT/IV/2017 TANGGAL 24 MARET 2017 dengan masa Berlaku 2017-2019
 - KPDP memiliki database Tuna dalam IFISH atas support dari MDPI
 - Beberapa kegiatan dalam komite yang sudah dilaksanakan antara lain kampanye larangan penangkapan ikan dengan destructive fishing melalui poster

yang ditempel di beberapa titik, mengajukan nelayan untuk mengikuti training BST dan SKK 60 mil yang difasilitasi PIP Makassar, serta laporan progress

➤ **Perkembangan lembaga pengelolaan perikanan –WPP NRI (Dr. Besweni, DJPT KKP)**

- a. Ada 11 WPP berdasarkan legalitas aspek perikanan. Ada estimasi potensi, dan ada RPP membutuhkan wadah untuk mengelola perikanan ini. RPP tidak disusun oleh pemerintah pusat saja, akan tetapi merupakan masukan dari semua stakeholder yang ada di dalam WPP
- b. dasar Hukum RPP sudah ada, perlu ada lembaga pengelola
- c. Setiap WPP memiliki SDM yang potensi. Ada akademisi, pemerintah, nelayan, supplier dll, oleh karena itu memang perlu adanya wadah/lembaga pengelola di masing-masing WPP.
- d. Team pengelola ini diharapkan bisa memberikan peran dalam merekomendasikan proram-program pengelolaan perikanan dengan baik.
- e. Sekretariat WPP memiliki beberapa pokja.
- f. Sekretariat WPP hanya mengkomunikasikan data yang diambil oleh stakeholder di WPP. Didiskusikan dalam panel ilmiah dan apabila ada problema yang muncul maka dibuat putusan sebagai upaya pegelolaan perikanan yang berstatus berbahaya stoknya. Hasil diskusi nantinya bisa dilanjutkan oleh sekretariat WPP ke pemerintah pusat.

Hal-hal yang sudah dilakukan oleh LPP WPP NRI:

- Sudah ada landasan Hukum (SK Dirjen untuk lembaga pengelola)
- Memiliki SK Dirjen untuk tugas-tugas masing-masing bidang dalam struktur. Catatan: posisi orang dalam struktur organisasi WPP adalah: Eselon 2
- sosialisasi sudah selesai
- Sekretariat 11 WPP sudah selesai
- Bahan-bahan kebutuhan sekretarat WPP sudah selesai
- Perikanan target dan sistim sudah selesai

Kendala:

- Peraturan metri belum ditandatangani
- SDM masih menjadi kendala. Dimana biayanya juga tinggi
- Ada persepsi yang belum sama dengan lembaga pengelola

Hal-hal yang harus dilakukan di 2019:

- Menyelesaikan draft Permen untuk LPP
- Pemutakhiran SDM pada LPP WPPNRI
- Penyamaan persepsi terkait urgensi operasional LPP WPP dengan lingkup KKP
- Koordinasi dengan Dit. Pelabuhan perikanan (pendataan melalui PIPP). Pusdatin (One data) dan optimalisasi E-Logbook.

Dasar-Dasar dalam Co-Management untuk nelayan kecil dan (A. Riza Baroqi, Co-Management Officer, MDPI)

- Co-Management/Pengelolaan Bersama yaitu kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam mengelola sumberdaya untuk keberlanjutan
- Co-Management diperlukan karena sumberdaya yang terbatas, dan digunakan oleh banyak pihak. Sehingga perlu dikelola secara bersama dengan baik
- Beberapa komponen dalam Co-Management yang memiliki peran penting yaitu Pemerintah, akademisi/peneliti, Industri, Nelayan, NGO dan Komunitas/masyarakat umum
- Beberapa tantangan dalam Co-Management yaitu komitmen/loyalitas seluruh stakeholder belum kuat, belum menjadinya prioritas masing-masing instansi, keterbatasan anggaran, dan informasi belum tersalur dengan baik kepada masyarakat
- Co-Management memiliki manfaat diantaranya adanya pengelolaan yang baik dalam menjaga sumberdaya, sehingga sumberdaya dapat lestari. Selain itu peningkatan kapasitas bagi stakeholder karena banyaknya informasi yang sangat bermanfaat sebagai bahan pengetahuan
- Co-Management bersama MDPI dilaksanakan di 6 Provinsi (Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara), dilaksanakan 2 kali dalam setahun
- Hasil dari pertemuan Co-Management yaitu rencana aksi bersama yang telah disepakati, untuk ditindaklanjuti bersama dalam menyelesaikan isu yang sedang berkembang di masing-masing daerah

Diskusi terbuka: Bagaimana agar Co-Management untuk Nelayan Kecil di Daerah dapat Terintegrasi dengan LPP WPPRI (DKP NTT).

- Pada sesi ini, Ibu Ibes tidak berada di lokasi kegiatan, karena ada kepentingan lain. Ibu Ibes merupakan penggerak utama LPP WPPRI
- Kedepannya direncanakan bahwa KPDP yang ada di Provinsi dapat masuk dalam pokja LPP WPP. Oleh karena itu, saat ini masih belum didapatkan keterangan terkait langkah tersebut.

Diskusi terkait kesepakatan nama konsep Komite: (Saut Tampubolon)

- Seiring perkembangannya isu yang ditemukan, pada pertemuan KPDP ternyata tidak hanya membicarakan tentang data, namun juga isu-isu yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, KPDP akan diubah namanya menjadi Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (KPB) atau *Fisheries Co-Management Committee*

REKOMENDASI

1. Merekomendasikan kepada KKP dan Pemerintah Daerah agar Nelayan Skala kecil yg telah berhasil dalam mengikuti skema perbaikan pengelolaan perikanan, seperti Fair Trade dan FIP untuk mendapat prioritas bantuan program pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah seperti bantuan sarana penangkapan ikan dan asuransi nelayan, termasuk membantu dalam proses melengkapi persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut, antara lain: kartu KUSUKA, pembentukan KUB dan Koperasi untuk mendukung perikanan yg berkelanjutan dan mendorong nelayan lainnya untuk turut berpartisipasi pada program atau skema-skema perbaikan pengelolaan perikanan, baik yg dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Non Pemerintah (LSM, Perusahaan Perikanan, Asosiasi Nelayan).

2. Memohon dukungan KKP dalam penyelesaian kelengkapan dokumen Kapal Bantuan Pemerintah yang telah diserahkan kepada Nelayan Skala Kecil di (Bitung, Sangihe, Halmahera Selatan dan Morotai) agar bantuan sarana penangkapan ikan tersebut segera dapat digunakan oleh nelayan penerima bantuan. Komite akan membantu memberikan daftar kapal bantuan yang belum memiliki kelengkapan dokumen kapal, yaitu berupa nama dan jenis kapal bantuan, nama kelompok/koperasi dan lokasi.
3. Membuka akses data Perikanan dari KKP kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab.Kota) sehingga memiliki data acuan yang baik dalam perencanaan pengelolaan Perikanan di daerah.
4. Mendukung proses pengumpulan dan pemanfaatan data yang dilakukan oleh KKP melalui integrasi data dari komite pengelolaan bersama perikanan untuk kebutuhan pengelolaan perikanan. Data yang dihasilkan oleh komite pengelolaan bersama juga diharapkan dapat dipergunakan dalam implementasi Harvest Strategy dan atau tindakan pengelolaan perikanan lainnya.
5. Rapat menyepakati perubahan nama Komite Pengelola Data Perikanan (KPDP) menjadi Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (*Fisheries Co-Management Committee*).
6. Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (*Fisheries Co-Management Committee*) dapat dijalankan secara mandiri/dengan sistem sharing budget bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, LSM, Industri, Asosiasi dan lembaga donor lainnya.
7. Melakukan pembaharuan pada setiap Surat Keputusan Komite Pengelolaan Bersama di 6 (enam) provinsi untuk nama dan konsep yang telah disepakati dalam pertemuan Regional Komite.
8. Melalui Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (*Fisheries Co-Management Committee*) dapat menyampaikan permasalahan ditingkat daerah untuk disampaikan ditingkat pusat melalui panel konsultatif LPP WPPNRI, mengingat keterbatasan kemampuan dalam komite di tingkat daerah.
9. Penyusunan struktur organisasi Komite pengelolaan bersama perikanan akan dilakukan melalui diskusi kelompok kecil baik secara langsung maupun intersesional.
10. Meningkatkan peran serta anggota komite dalam melaksanakan rencana aksi yang telah disepakati.
11. Menyampaikan hasil pertemuan ini kepada Dirjen Perikanan Tangkap dan Sekjen KKP.

DOKUMENTASI

LAMPIRAN

Agenda Pertemuan Regional
Komite Pengelolaan Bersama Perikanan Nelayan Kecil
(Small Scale Fisheries Co-Management Committee)
 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
 Jakarta, 16 Januari 2019

Waktu	Kegiatan	Narasumber/PJ	Keterangan
08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitia	
08.30 – 09.45	Pembukaan Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Menyanyikan lagu Indonesia Raya • Do'a • Pengantar Plt. Direktur PSDI - DJPT • Pengantar MDPI 	MC: Mumpuni CP <ul style="list-style-type: none"> • Dwi Eni Juliastuti • Roys Birrul .M. • Plt. Direktur PSDI –DJPT • Direktur Eksekutif MDPI 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Arahan dan Pembukaan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat dan cendramata kepada 6 (enam) <i>supplier champion</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Jenderal Perikanan Tangkap 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Foto Bersama 	<ul style="list-style-type: none"> • Panitia 	
09.45 – 10.30	Presentasi Panel I dan Diskusi: <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pengelolaan Tuna Nasional • Outlook kebijakan pembinaan nelayan kecil TA 2019 	<ul style="list-style-type: none"> • Kasubdit SDI ZEEI dan Laut Lepas, Dit. PSDI – DJPT • Kepala Bagian Program, Setditjen PT – DJPT 	Moderator: Kepala Pusat Riset Perikanan – BRSDMKP
	Coffee Break		
10.45 – 11.30	Presentasi Panel II dan Diskusi: Berbagi pengalaman terhadap capaian & tantangan dalam KPDP di masing-masing provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Prov. Maluku • Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Prov. Maluku Utara • Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Prov. Sulawesi Utara 	Moderator: Kepala Balai Riset Perikanan Laut, PUSRISKAN – BRSDMKP Waktu Presentasi: 10 Menit untuk setiap Narasumber Waktu diskusi: 15 Menit

11.30 – 12.15	<p>Presentasi Panel III dan Diskusi:</p> <p>Berbagi pengalaman terhadap capaian & tantangan dalam KPDP di masing-masing provinsi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Prov. NTB • Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Prov. NTT • Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Prov. Sulawesi Selatan 	<p>Moderator: Kepala Loka Riset Perikanan Tuna, PUSRISKAN – BRSDMKP</p> <p>Waktu Presentasi: 10 Menit setiap Narasumber</p> <p>Waktu diskusi: 15 Menit</p>
12.15 – 13.15	ISHOMA		
13.15 – 14.00	<p>Presentasi Panel IV dan Diskusi:</p> <p>Overview pengelolaan bersama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dasar-dasar dalam co-management untuk nelayan kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • A. Riza Baroqi, <i>Co-Management Officer</i> - MDPI 	<p>Moderator: Beny Iskandar, Kabid Perikanan Tangkap DKP NTB</p> <p>Waktu Presentasi: 10 Menit setiap Narasumber</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan Lembaga Pengelolaan Perikanan – WPPNRI 	<ul style="list-style-type: none"> • Kasubdit SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan 	
14.00 – 15.00	<p>Diskusi terbuka:</p> <p>Bagaimana agar co-management untuk nelayan kecil di daerah dapat diintegrasikan dalam Lembaga Pengelolaan Perikanan – WPPNRI</p>	<p>Moderator: Ernes D. Hamel, Kabid Perikanan Tangkap DKP NTT</p>	Presentasi
15.00 – 15.30	Diskusi terkait kesepakatan nama dan konsep Komite	Direktur Eksekutif MDPI	Diskusi
15.30 – 16.15	Pembacaan rekomendasi pelaksanaan co-management untuk nelayan kecil yang lebih baik	Wildan, <i>Manager Fisheries Improvement Team</i> MDPI	Diskusi
16.15	Penutup		
		Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	

PESERTA

1. Zulfikar Mochtar (Dirjen Perikanan Tangkap, KKP)
2. Trian Yunanda (Dit PSDI, KKP)
3. Eko Prianto (Pusrisikan)
4. Zulkarnaen Fahmi (Loka Riset Perikanan Tuna)
5. Yusuf F (DJPT, KKP)
6. Sunaryo (DJPT, KKP)
7. Lukman Ariadi (DJPT, KKP)
8. Ratna D. (Dit PDK, KKP)
9. Ariati M. (Dit PDK, KKP)
10. Ning Mulyana (Dit PDK, KKP)
11. Hary Christijanto (Dit PSDI, KKP)
12. Dr. Besweni (DJPT, KKP)
13. Cahyani Dwi Setyawati (Dit PSDI, KKP)
14. Enang Rucita (Dit PSDI, KKP)
15. Mumpuni C. Pratiwi (Dit PSDI, KKP)
16. Dwi Eni Juliastuti (DJPT, KKP)
17. Roys Birul (DJPT, KKP)
18. Neneng (DJPT, KKP)
19. Riana Handayani (DJPT, KKP)
20. Rizal Rifai (DJPT, KKP)
21. Cahyo Priono (DJPT, KKP)
22. Joko S. (BHKLN, KKP)
23. Oki A. (BHKLN, KKP)
24. Ade Fitria Nola (BHKLN, KKP)
25. Nasrulloh K. (BHKL, KKP)
26. Yosef (Humas)
27. Lukman (KH?)
28. Andi S (M.BDRU)
29. Ahmad Umarella (DKP Prov. Maluku)
30. Ibrahim Asnawi (DKP Prov. Maluku Utara)
31. Ernes D. Hamel (DKP Prov. NTT)
32. Febrian Budianto (DKP Prov. Sulawesi Selatan)
33. Tienneke Adam (DKPD Prov. Sulawesi Utara)
34. Hamin S. (Dinas Perikanan Kab. Buru)
35. Fitriah (Dinas Perikanan Kota Ternate)
36. Safri Ishak (Dinas Perikanan Kab. Halmahera Selatan)
37. Ernist H. U. (Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Sangihe)
38. Orson Nawa (Dinas Perikanan Kota Kupang)
39. Ruslan W. (Dinas Perikanan kab. Maluku tengah)
40. Masita Lohor (Dinas Perikanan Kab. Pulau Morotai)
41. Aziz (Dinas Perikanan Kab. Lombok Timur)
42. M. Sofyan (Dinas Perikanan Kab. Bone)
43. Widhya (LIPI Ambon)
44. Prof. Dr. Jamaludin Jompa (UNHAS)
45. Sekendri (PT. BOGI)
46. Sarah Hutapea (PT. Harta Samudera)
47. Phi Bun Tjuan (Muara baru)
48. Sarman Hijan (Supplier Maluku Utara)
49. La Ode Jaerudin (Supplier Seram Utara)
50. Roni Ego Artha (Supplier CV. Versace, Lombok)
51. Anasrin Hj Hamdjah (Supplier Ternate)
52. Saldin Bonelalo (Supplier Buru)
53. Yonathan Atimeta (Supplier CV. ASK Kupang)

54. H. Andi Syahrul (Supplier Bone)
55. Kahar Lastori (Supplier Morotai)
56. Muchsin (Supplier Sangihe)
57. Asaad Sopamena (Supplier Seram Selatan)
58. Sofyan Bagu (Supplier Bacan)
59. Bakar (Nelayan Lombok)
60. Agus Setiawan (Nelayan Kupang)
61. Danri M. Djae (Nelayan Ternate)
62. Hayon Buton (Nelayan Buru)
63. Jumadel Mataga (Nelayan Morotai)
64. Alwia Kaledupa (Nelayan Seram Utara)
65. Mansur (Nelayan Bone)
66. La Tohia (Nelayan Seram Selatan)
67. Ferdi tamara (Nelayan Sangihe)
68. Ardani Sanusi (nelayan Bacan)
69. Irna Sari (USAID SEA)
70. Nandana Godjali (TNC)
71. Anka Farita (TNC)
72. Saraswati Adiyarini (WWF Id)
73. Abdul Muis (AP2HI)
74. Agus Abdurahman (SFP)
75. Rocky P. (IPNLF)
76. Kyana (IPNLF)
77. Sven Blankenhorn (PBN)
78. Heri (PBN)
79. Saut Tampubolon (MDPI)
80. Deirdre E. Duggan (MDPI)
81. Lanny Djauhary (MDPI)
82. Olivia Tanujaya (MDPI)
83. Yasmine Simbolon (MDPI)
84. Stephani Mangunsong (MDPI)
85. Wildan (MDPI)
86. Moh. Syifa (MDPI)
87. Margaleta (MDPI)
88. Santri Dinalhusna (MDPI)
89. Putra Satria Timur (MDPI)
90. A. Riza Baroqi (MDPI)
91. Karel Yerusa (MDPI)
92. Prayoga Miftahul Huda (MDPI)
93. Amrollah (MDPI)
94. Djamal (MDPI)
95. Muslim Ambari (Mongabay)
96. Desti Kusumo (TV One)
97. Tedi Suhendi (TV One)
98. Immanuel C. (RRI)
99. Victor (Wartaekspres)
100. A. Lana (Wartaekspres)
101. Yosef
102. Nely (Indopost)
103. Latif (Kumparan)
104. Lukita (Kompas)
105. Etha (Bisnis Indonesia)
106. Fitri W. (Tribun News)
107. Ginting (Sinar Pagi baru)
108. Damiana (Investor Daily)